

LAPORAN TAHUNAN 2019



**BPTD WILAYAH X
PROVINSI JATENG & DIY
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2019. Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY dalam kurun waktu Tahun 2019.

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta sasaran program dan kegiatan yang diampu oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY sebagai perwujudan atas pelaksanaan Tahun 2019, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY berhasil mencatat hasil pelaksanaan kegiatan yang mana pada tahun 2019 merupakan tahun kedua dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran secara penuh selama 1 tahun karena Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY terbentuk pada pertengahan tahun 2017.

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari dalam meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja dan pelayanan yang diberikan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY berusaha meningkatkan kinerja demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi seluruh pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY dalam menjalankan organisasi dengan tata kelola dan kinerja yang baik, sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Besar harapan Saya, Laporan Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2018 ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan sektor perhubungan darat pada wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY sehingga dapat bermanfaat bagi publik, para stakeholder yang berkepentingan di bidang transportasi, serta pengguna jasa transportasi. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang akurat, tepat, dan akuntabel bagi public.

KEPALA BPTD WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH & DIY



Ir. PRASETYO KENTJONO, Dipl.HE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan tahunan (LAPTAH) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama satu tahun.

Berdasarkan capaian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dari alokasi anggaran sebesar Rp 209.612.913.000 capaian realisasi anggaran yang tercapai sebesar 95.68% (Rp 200.553.922.514) yang dimanfaatkan untuk keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi darat maupun peningkatan kapasitas guna mendukung konektivitas nasional sebagai upaya mewujudkan Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Sepanjang Tahun 2019, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview pada tahun 2019 sebanyak 33 Indikator dari 6 Sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan dengan baik, 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang kurang dari 50% (<50%), 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang lebih besar dari 50% dan di bawah 100% (50%<IK<100%), dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$). Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 99%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target (kurang dari 100%) namun dalam kategori baik karena sudah mencapai 99%. Hal ini menandakan capaian sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
GAMBARAN UMUM.....	1
Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
Sumber Daya Manusia.....	5
Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	6
BAB II	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN	
TRANSPORTASI DARAT.....	10
Pembangunan dan Pengelolaan lalu lintas perhubungan darat.....	10
Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan.....	13
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat.....	14
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat.....	14
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda.....	14
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat.....	15
BAB III	
CAPAIAN KINERJA DAN TARGET.....	21
CAPAIAN KINERJA.....	21
CAPAIAN TARGET.....	21
BAB IV	
PENUTUP.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3
Matrik Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan dan Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun Anggaran 2019.....	11
Peta Perlengkapan Jalan Provinsi Jawa Tengah.....	11
Peta Perlengkapan Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	12
Gambar Peta Lokasi ATCS Kab. Banyumas Tahun 2019.....	13
Tabel Realisasi Keuangan Tahun 2019.....	21

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dituntut untuk menyelenggaraan sistem pemerintahan dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Lima Tahun 2015 - 2019 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Tahunan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2019 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat pada Tahun 2019 membawahi 37 (tiga puluh tujuh) unit satuan pelayanan yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit satuan pelayanan Terminal Tipe A (TTA) dan 17 (tujuh belas) unit satuan pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), yaitu :

1. TTA Tirtonadi;
2. TTA Ir. Soekarno;
3. TTA Bobotsari;

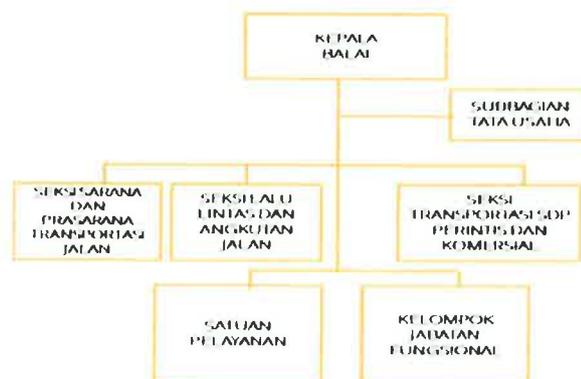
4. TTA Bangga Bangun Desa;
5. TTA Tingkir;
6. TTA Pemalang;
7. TTA Jati;
8. TTA Dhaksinarga;
9. TTA Pekalongan;
10. TTA Kebumen;
11. TTA Giri Adi Pura;
12. TTA Tidar;
13. TTA Mangkang;
14. TTA Bawen;
15. TTA Cepu;
16. TTA Mendolo;
17. TTA Bulupitu;
18. TTA Purworejo;
19. TTA Giwangan;
20. TTA Tegal;
21. UPPKB Selogiri;
22. UPPKB Toyogo;
23. UPPKB Pringsurat;
24. UPPKB Salam;
25. UPPKB Gubug;
26. UPPKB Lebuawu;
27. UPPKB Sambong;
28. UPPKB Ajibarang;
29. UPPKB Kalitirto;
30. UPPKB Wanareja;
31. UPPKB Subah;
32. UPPKB Kulwaru;
33. UPPKB Taman Martani;
34. UPPKB Banyudono;
35. UPPKB Klepu;
36. UPPKB Sarang;
37. UPPKB Tanjung

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial, dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan evaluasi dan laporan.

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelaksana, dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis
Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- e. Satuan Pelayanan
Mempunyai tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menaungi sebanyak 1.530 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sebanyak 108 Pegawai.
- 2) TTA Tirtonadi sebanyak 213 Pegawai;
- 3) TTA Ir. Soekarno sebanyak 72 Pegawai;
- 4) TTA Bobotsari sebanyak 26 Pegawai;
- 5) TTA Bangga Bangun Desa sebanyak 46 Pegawai;
- 6) TTA Tingkir sebanyak 47 Pegawai;
- 7) TTA Pemalang sebanyak 67 Pegawai;
- 8) TTA Jati sebanyak 30 Pegawai;
- 9) TTA Dhaksinarga sebanyak 39 Pegawai;
- 10) TTA Pekalongan sebanyak 46 Pegawai;
- 11) TTA Kebumen sebanyak 45 Pegawai;
- 12) TTA Giri Adi Pura sebanyak 51 Pegawai;
- 13) TTA Tidar sebanyak 39 Pegawai;
- 14) TTA Mangkang sebanyak 47 Pegawai;
- 15) TTA Bawen sebanyak 44 Pegawai;
- 16) TTA Cepu sebanyak 22 Pegawai;
- 17) TTA Mendolo sebanyak 28 Pegawai;
- 18) TTA Bulupitu sebanyak 89 Pegawai;
- 19) TTA Purworejo sebanyak 36 Pegawai;
- 20) TTA Giwangan sebanyak 106 Pegawai;
- 21) TTA Tegal sebanyak 53 Pegawai;
- 22) UPPKB Selogiri sebanyak 1 Pegawai;
- 23) UPPKB Toyogo sebanyak 1 Pegawai;
- 24) UPPKB Pringsurat sebanyak 1 Pegawai;
- 25) UPPKB Salam sebanyak 2 Pegawai;
- 26) UPPKB Gubug sebanyak 3 Pegawai;
- 27) UPPKB Lebuawu sebanyak 2 Pegawai;
- 28) UPPKB Sambong sebanyak 1 Pegawai;
- 29) UPPKB Ajibarang sebanyak 23 Pegawai;
- 30) UPPKB Kalitirto sebanyak 20 Pegawai;
- 31) UPPKB Wanareja sebanyak 20 Pegawai;
- 32) UPPKB Subah sebanyak 39 Pegawai;
- 33) UPPKB Kulwaru sebanyak 31 Pegawai;
- 34) UPPKB Taman Martani sebanyak 23 Pegawai;
- 35) UPPKB Banyudono sebanyak 24 Pegawai;
- 36) UPPKB Klepu sebanyak 31 Pegawai;
- 37) UPPKB Sarang sebanyak 39 Pegawai;
- 38) UPPKB Tanjung sebanyak 15 Pegawai.

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1.4.1 Potensi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangan pada bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;
- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif.

1.4.2 Isu Strategis

- a. Membangun Konektivitas Nasional untuk keseimbangan pembangunan Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional :
 1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
 2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;

3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
 4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
 5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;
 6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
 7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.
- b. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:
1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
 2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
 3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

1.4.3 Permasalahan

a. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - a) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal dikarenakan belum semua jembatan timbang beroperasi;
 - b) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;

- c) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - 1) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - 2) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb.
 - d) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
 - e) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - 1) Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - 2) Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - 3) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
 - 4) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.
- b. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 1. Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
 - 2. Belum tersusun data sarana prasarana transportasi penyeberangan;
 - 3. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
 - 4. Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota;
 - 5. Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.

- c. Permasalahan Transportasi Perkotaan
 - 1. Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - 2. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - 3. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
 - 4. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi;
 - 5. Kemacetan lalu lintas;
 - 6. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
 - 7. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

- d. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat
 - 1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
 - 2. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
 - 3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
 - 4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

- e. Permasalahan Ketatausahaan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor Induk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan secara teknis dan administrasi mengingat wilayah kerja yang cukup luas.

BAB II

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

A. Pembangunan dan Pengelolaan lalu lintas perhubungan darat

Pada Program Pembangunan dan Pengelolaan lalu lintas perhubungan darat terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pengadaan dan Pemasangan ATCS dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan total anggaran sebesar Rp. 33.847.765.000 dengan detail pekerjaan sebagai berikut:

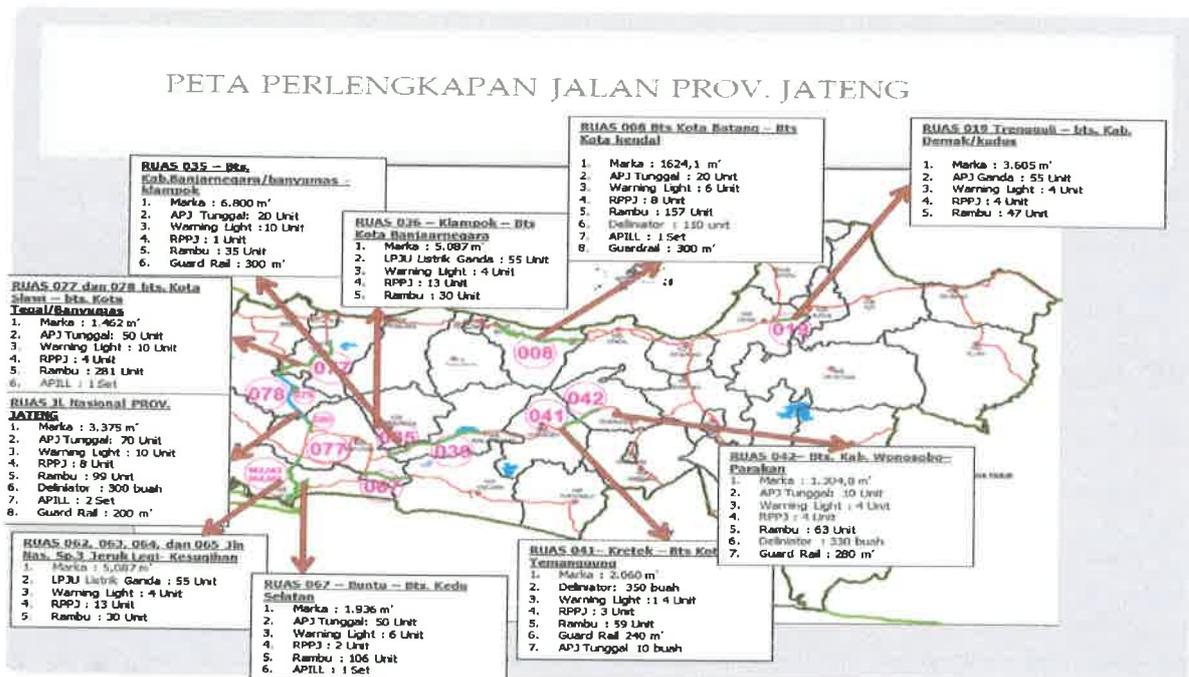
1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

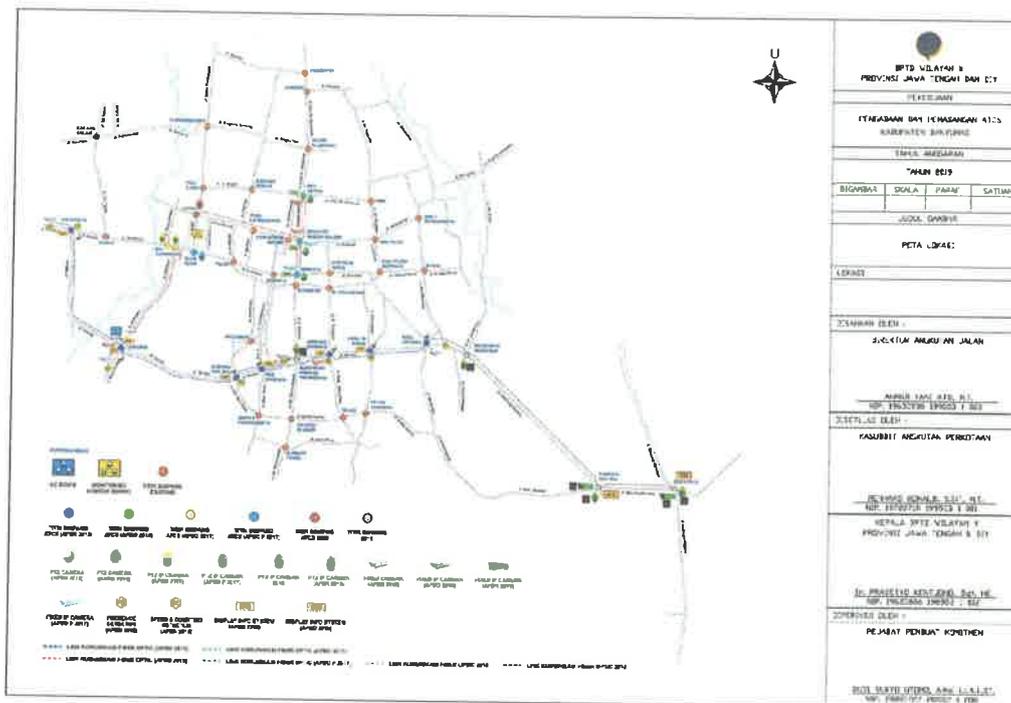
- a) Ruas 029-030 Wangon – Rawalo (Termasuk Supervisi)
- b) Ruas 010-011 Jalan Plelen Utara – Jalan Plelen Selatan (Termasuk Supervisi)
- c) Ruas 012.11.K-014 Jalan Lingkar Weleri – Batas Kota Semarang (Termasuk Supervisi)
- d) Ruas 099 Simpang 3 Exit Tol Pejagan – Batas Kab. Tegal/Brebes (Termasuk Supervisi)
- e) Ruas 021-023 Batas Jati – Batas Kab. Pati/Kudus (Termasuk Supervisi)
- f) Ruas 034 Banyumas – Batas Kab. Banjarnegara (Termasuk Supervisi)
- g) Ruas 074 Duwet – Giriwoyo (Termasuk Supervisi)
- h) Ruas 075 Giriwoyo – Glonggong Batas Provinsi Jawa Timur (Termasuk Supervisi)
- i) Ruas 085 Purwokerto – Patikraja (Termasuk Supervisi)
- j) Ruas 100 Batas Kab. Tegal/Brebes – Prupuk (Termasuk Supervisi)
- k) Ruas 103.11.K – 103.15.K Jalan Soekarno Hatta – Jalan Ahmad Yani (Termasuk Supervisi)
- l) Ruas 103 Margoyoso – Batas Kota Jepara (Termasuk Supervisi)
- m) Ruas Jawa Tengah (Termasuk Supervisi)
- n) Ruas 006 Ruas Jalan Bts. Kab. Kulonprogo - YogyakartaKidul (Termasuk Supervisi)
- o) Ruas 007 Ruas Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta) (Termasuk Supervisi)
- p) Ruas 017, 018 Ruas Jalan Arteri Utara Barat - Arteri Utara Yogyakarta (Termasuk Supervisi)
- q) Ruas 019 (11k) - 019 Ruas Jalan Bts. Kota Yogyakarta - Janti - Prambanan (Termasuk Supervisi)
- r) Ruas 020 Ruas Jalan Yogyakarta - Bts.Kota Bantul - Jl. Pemuda - Jl. Kol Sugiyono - Jl. Brigjen Katamso - Jl. P. Senopati (Termasuk Supervisi)
- s) Ruas Jalan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Termasuk Supervisi)

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di dapat data sebagai berikut dalam bentuk tabel.

MATRIK EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NOMOR RUAS JALAN	VOLUME																
		PANJANG RUAS Km	MARKA M'	MARKA KUNING M'	RPPJ Buah	RAMBU Buah	RAMBU TIANG Buah	RAMBU PORTAL Buah	RAMBU CHEVRON Buah	APJ KONVEN TUNGGAL Unit	APJ KONVEN GANDA Unit	APILL Paket	WAINING LIGHT Unit	PAKU JALAN Buah	GUARDRAIL Meter	DELINATOR Unit	CERMIN TUKUNGAN Unit	
1	Ruas Jalan No 006 Batas Kab Kulonprogo - Yogyakarta		8159			15				30			2				100	
2	Ruas Jalan No 007 Arteri Selatan		2663			10					45		2				300	
3	Ruas Jalan No 017 - 018 Arteri Utara Barat - Arteri Utara Yogyakarta		5090			20					30		2					
4	Ruas Jalan No 019 (11.K) - 019 BTS Kota Yogyakarta - Janti - Prambanan		4599		3	10					40		2					
5	Ruas Jalan No 020 Yogyakarta - BTS. Kota Bantul - Jl Pemuda - Jl. Kol. Suglyono - Jl. Brigjen Katamso		3365		2	20				30			2					
6	Ruas Jalan Nasional Provinsi DIY				11	27							2					





Gambar Peta Lokasi ATCS Kabupaten Banyumas 2019

3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- a) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- b) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan

Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan terdiri dari Bimbingan Teknis Bidang Pembinaan Keselamatan, dan Operasional Jembatan Timbang dengan total anggaran sebesar Rp 1.501.592.000 dengan detail kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Bidang Pembinaan Keselamatan

a) Program aksi keselamatan transportasi darat

42 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kab/ Kota se Jateng dan DIY sudah terkalibrasi dengan jumlah alat terkalibrasi 329 alat uji.



Dokumentasi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Operasional Jembatan Timbang

BPTD memiliki total 17 UPPKB dengan rincian 4 UPPKB operasional (Sarang, Subah, Kulwaru, dan Wanareja) dan 13 UPPKB tidak operasional.

C. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat

Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan terdiri dari Pembangunan Terminal, dan Rehabilitasi Terminal anggaran sebesar Rp 11.208.436.159 dengan detail kegiatan sebagai berikut:

1) Pembangunan Terminal

- a) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kab. Demak Tahap II (termasuk supervisi)
Rp. 4.278.109.000

2) Rehabilitasi Terminal

- a) Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Dhaksinarga Tahap II
Rp 1.125.773.159
Supervisi Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Dhaksinarga Tahap I
Rp 54.989.000
- b) Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Mangkang Tahap II
Rp 2.912.849.000
Supervisi Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Mangkang Tahap II
Rp 48.763.000
- c) Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto Tahap II
Rp 2.891.705.000
Supervisi Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto Tahap II
Rp 49.951.000

D. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat

Pada Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat terdiri perawatan Alat Kalibrasi dengan total anggaran sebesar Rp 25.000.000 dengan detail kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perawatan Alat Kalibrasi
Rp 25.000.000

E. Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda

Pada Program Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda terdiri dari operasional Terminal Tipe A dan Kepetintisan Angkutan Jalan dengan total anggaran sebesar Rp 43.590.782.000 dengan detail kegiatan sebagai berikut :

- 1) Keperintisan Angkutan jalan
a) Subsidi Operasional Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah dan pengawasan
Rp 823.170.000
- 2) Operasional Terminal Penumpang Tipe A

BPTD memiliki total 20 Terminal Penumpang Tipe A dengan anggaran operasional Rp 42.767.612.000

F. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat

Program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya terdiri dari layanan internal, dan layanan perkantoran dengan total anggaran sebesar Rp 97.573.555000 dengan detail kegiatan sebagai berikut:

1) Layanan Internal

a) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya

- 1) Sosialisasi pembinaan kepegawaian di seluruh satpel
- 2) Sosialisasi pelaksanaan Angkutan lebaran
- 3) Sosialisasi pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru

b) Peningkatan Motivasi bagi pegawai BPTD Wil. X Prov. Jateng dan DIY

Pelaksanaan motivasi pegawai Kantor BPTD sebanyak 220 peserta dilaksanakan pada tanggal 8-10 Februari 2019 di Barak Militer Bantir Sumowono, 220 peserta pada 22-24 Februari di Puslatpur Militer Paliyan Yogyakarta dan 360 peserta pada tanggal 22-24 November 2019 di Barak Militer Bantir Sumowono.



Foto Dokumentasi Motivasi Pegawai

c) Penyusunan Bahan, rencana kerja dan anggaran

d) Penyusunan LAKIP, LAPTAH, DAN PENETAPAN KINERJA

- e) Rapat Teknis/Koordinasi/konsolidasi
Melaksanakan undangan rapat dari beberapa instansi baik vertical maupun horizontal.
- f) Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- g) Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat
- h) Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :
 - 1) Pendampingan Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
8 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kab/Kota sudah terakreditasi. Dengan hasil : 6 Unit terakreditasi B, 2 Unit terakreditasi C



Foto Pendampingan Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

- 2) Kalibrasi Alat Uji Kendaraan
42 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kab/Kota se Jawa Tengah dan DIY sudah terkalibrasi dengan jumlah alat terkalibrasi 329 alat uji.



Foto dokumentasi Kalibrasi Alat Uji Kendaraan

- 3) Melaksanakan Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Karoseri sesuai dengan Rancang Bangun Kendaraan, dengan jumlah kendaraan 6.406 kendaraan.



Foto dokumentasi Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun

4) Inventarisasi bengkel karoseri

Terinventarisasinya bengkel karoseri dengan jumlah 117 bengkel karoseri dengan rincian 50 aktif, 37 tidak aktif, dan 30 belum terdaftar.



Foto dokumentasi Inventarisasi bengkel karoseri

5) Monitoring, Pengawasan dan Inventarisasi Terminal Tipe A

Terpenuhinya kebutuhan operasional dan rehabilitasi Terminal Tipe A, serta terlaksanakannya pelayanan sesuai dengan SOP.



Foto Dokumentasi Monitoring, Pengawasan dan Inventarisasi Terminal Tipe A

6) Monitoring, Pengawasan dan Inventarisasi UPPKB

Terpenuhinya kebutuhan operasional dan rehabilitasi UPPKB, serta terlaksanakannya pelayanan sesuai dengan SOP.



Foto Dokumentasi Monitoring, Pengawasan dan Inventarisasi UPPKB

- 7) Rapat Koordinasi Pengalihan Pelayanan Kalibrasi dan Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun dengan undangan seluruh Dinas Perhubungan Kab/Kota Jawa Tengah dan DIY

Teralihkannya pelayanan Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun dari Dinas Perhubungan Provinsi ke BPTD pada Agustus 2018, dan Pelayanan Kalibrasi dari Dit Sarana ke BPTD pada Maret 2019



Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengalihan Pelayanan Kalibrasi dan Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun

- i) Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya
- 1) Monitoring rapat dan evaluasi andalalin



Foto Dokumentasi Rapat Andalalin

2) Inspeksi Keselamatan dan Penegakan Hukum



Foto Dokumentasi Penegakan Hukum

3) kegiatan rapat teknis bidang Lalu lintas dengan instansi lain



Foto Dokumentasi Rapat Teknis Bidang LLAJ

4) Survey Inventarisasi Perlengkapan jalan



Foto Dokumentasi Survey Inventarisasi Perlengkapan jalan

- j) Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP, terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya
- 1) Kordinasi dengan Dishub Jogja terkait bantuan faskes TA 2019



Foto Dokumentasi Kordinasi dengan Dishub Jogja terkait bantuan faskes TA 2019

- 2) Menghadiri penyerahan simbolis bantuan life jacket dan waterbarier di Dishub Wonogiri
- 3) Rapat Pelaksanaan Rampcheck Kapal SDP persiapan Angleb 2019
- 4) Rapat Pembahasan Kerusakan KM Kalibodri
- 5) Pendampingan Kunker Diaktur. ASDP Ke Pelabuhan Kendal
- 6) Melaksanakan Monitoring Sarana ,Prasarana Pelabuhan Peyeberangan dan Waduk di seluruh wilayah kerja BPTD X Jateng dan DIY
- 7) Koordinasi dengan Direktur ASDP terkait pelaksanaan pengukuran kapal
- 8) Menghadiri rapat pembahasan pengukuran kapal dan pendaftaran kapal

- 2) Layanan Perkantoran
 - a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

BAB III CAPAIAN KINERJA DAN TARGET

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga penilaian keberhasilan dibuat sasaran beberapa sasaran strategis yaitu:

- a) Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat Yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan angkutan Perkotaan;
- b) Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan;
- c) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
- d) Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN BPTD;
- e) Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
- f) Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD.

Dari beberapa sasaran strategis untuk sasaran strategis

1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat Yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan angkutan Perkotaan;
2. Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan;
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
4. Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN BPTD;
5. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
6. Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD.

B. CAPAIAN TARGET

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Keu
1	Barang	76.204.187.000	72.268.983.931	94,84%
2	Pegawai	82.023.995.000	77.108.632.007	94,01%
3	Modal	51.384.731.000	51.176.306.576	99,59%
	Total	209.612.913.000	200.553.922.514	95,68%

Tabel realisasi keuangan Tahun 2019

Beberapa item kegiatan yang tidak sesuai dengan target sebesar Rp. 9.058.990.486 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

1. Sisa belanja pegawai sebesar Rp 4.915.362.993.
2. Sisa belanja barang Rp 3.935.203.069.
3. Sisa belanja modal sebesar Rp 208.424.424.

Beberapa Hambatan/Kendala Masih Rendahnya Realisasi Daya Serap Anggaran Antara Lain:

1. Sisa belanja pegawai sebesar Rp 4.915.362.993 di karenakan banyak pegawai yang pension dan meninggal dan uang lembur pegawai tidak terealisasikan;
2. Sisa belanja barang Rp 3.935.203.069 dikarenakan belanja modal yang masuk ke akun belanja barang dan sisa operasional terminal, UPPKB, dan BPTD;
3. Sisa belanja modal sebesar Rp 208.424.424 berupa nilai kontraktual.

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program perlu adanya perencanaan yang baik *controlling*/ pengaturan secara berkala sehingga tujuan kebijakan dapat sesuai dengan sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih.